

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang tujuannya tidak didasarkan dengan laba, namun memberikan kesejahteraan masyarakat yang berupa pelayanan masyarakat. Organisasi sektor publik ini terbagi menjadi dua yaitu non pemerintah dan pemerintah. Pemerintahan daerah adalah salah satu organisasi sektor publik pemerintah. Peran pemerintah pusat dalam mengontrol pelaksanaan pemerintahan daerah dilakukan dengan membuat kebijakan. Hal tersebut dapat memberi dampak kepada pemerintahan daerah untuk tidak bergantung pada pemerintahan pusat.

UU No. 32 tahun 2004 menyatakan Pemerintahan Daerah menjadi dasar adanya otonomi daerah sehingga, daerah dapat berotonomi luas dan bertanggungjawab. Dalam prakteknya, Sebuah organisasi sektor publik dapat mencapai tujuannya apabila mampu memaksimalkan kinerja, ini berarti tidak hanya didasarkan pada keberhasilan memperoleh laba dalam laporan keuangannya saja. Kinerja disebut sebagai prestasi kerja dan penyelenggaraan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sehingga, kinerja sangatlah diperhatikan dalam sebuah organisasi sektor publik (Amanda dan Suputra, 2019).

Penelitian-penelitian yang membahas kinerja pemerintah sudah banyak dilakukan sebelumnya di berbagai daerah. Penelitian tersebut menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan peningkatan atau penurunan kinerja pemerintah. Faktor-faktor tersebut

diantaranya transparansi dan akuntabilitas. Namun hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Pada penelitian Jitmau dkk (2017) dan penelitian Elkha dan Wahidawati (2020) pengaruh transparansi terhadap kinerja dinyatakan positif begitu pula pada penelitian Damayanti dan Hermanto (2018) dan penelitian Sihombing dan Arsani (2020). Sedangkan, pengaruh transparansi terhadap kinerja dinyatakan negatif pada penelitian Ningsih dan Riharjo (2019). Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja lebih dominan dibanding hasil yang berpengaruh negatif, ini berarti transparansi yang diartikan sebagai keterbukaan informasi mampu meningkatkan kinerja pemerintah.

Sedangkan, pada penelitian Candrakusuma dan Jatmiko (2017) hasil yang diperoleh menyatakan akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja. Namun, Jatmiko (2020) dan Setiawan dan Safri (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja. Selanjutnya, Novatiani dkk (2019) dan Arifin dkk (2020) juga menyatakan positif antara hubungan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah. Ini menunjukkan bahwa organisasi sektor publik sudah menerapkan akuntabilitas dengan baik dan akuntabilitas menjadi ukuran dalam menunjukkan kinerjanya. Hasil-hasil penelitian yang tidak konsisten mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas menjadi motivasi bagi peneliti untuk dapat melakukan penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah. Selain itu, ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut

dimungkinkan dipengaruhi oleh faktor lain sebagai faktor yang mampu memperlemah atau memperkuat pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan salah satu pemerintah yang sedang mengalami kesuksesan kinerja dalam 9 tahun ini dilihat dari opini audit yang diperoleh kabupaten Temanggung. Hal tersebut dilansir dari laman Gatra.com 26 Mei 2021 yang ditulis oleh Raditia (2021) bahwa BPK RI Jawa Tengah sudah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2020, yang menjadi ke 9 kali. Untuk itu pemerintah Kabupaten Temanggung harus dapat mempertahankannya.

Namun, pada penelitian yang dilakukan Adriana (2017) tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis website pemerintah daerah, mengungkapkan bahwa tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2015 Kabupaten Temanggung menduduki peringkat 53 dari 199 kabupaten, sedangkan pada 2016 peringkat Kabupaten Temanggung menurun di peringkat 57. Selain itu, pada penelitian Setyowati dan Yuliani (2020) yang membahas mengenai transparansi pemerintah Kabupaten Temanggung menyampaikan bahwa transparansi laporan keuangan Kabupaten Temanggung belum dilaksanakan maksimal, hal ini dilihat dari Pemkab Temanggung (2020) yang masih belum lengkap dalam menyampaikan laporan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi

pemerintah Kabupaten Temanggung masih belum maksimal, sehingga dapat menurunkan kualitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Temanggung.

Selain fenomena mengenai transparansi, fenomena mengenai akuntabilitas pada Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari predikat SAKIP (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah) yang masih belum menunjukkan predikat memuaskan. Predikat SAKIP tersebut dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

TABEL 1.1
Predikat SAKIP Pemerintah Kabupaten Temanggung

NO	Tahun	Predikat Sakip	Keterangan
1.	2018	CC	Cukup baik (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
2.	2019	B	Baik, dan perlu sedikit perbaikan
3.	2020	B	Baik, dan perlu sedikit perbaikan

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan predikat CC pada tahun 2018. Sedangkan untuk tahun 2019 mendapatkan predikat B, sementara untuk tahun 2020 masih belum bisa naik ke predikat BB atau A. Padahal, sudah banyak wilayah kabupaten atau provinsi yang mendapatkan predikat diatas B. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah Kabupaten Temanggung juga masih belum maksimal, sehingga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Temanggung.

Untuk itu, pemerintahan daerah harus melihat faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerjanya untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan seperti transparansi dan akuntabilitas. Selain itu Allah juga menyuruh hamba-Nya untuk selalu menjaga amanah, dan selalu bersikap adil, apalagi sebagai pemimpin pemerintah harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap amanah yang telah diberikan oleh masyarakat. Hal ini dijelaskan pada surah An-Nisa ayat 58.

نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Transparansi merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan kinerja sebuah organisasi. Benawan, dkk (2018) menjelaskan bahwa transparansi adalah tindakan pengambilan keputusan yang dilaksanakan dengan cara atau proses yang berdasarkan aturan atau regulasi yang sudah ditetapkan oleh organisasi. Pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya, memiliki berbagai informasi yang dapat secara luas di beritahukan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya. Apabila hal itu dapat dilakukan dengan baik maka

masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dengan baik. Karena kedua belah pihak dapat mengontrol satu sama lain.

Selain itu, akuntabilitas juga menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan kinerja organisasi. Mardiasmo (2009) mengartikan akuntabilitas adalah kewajiban menyajikan laporan serta mempertanggungjawabkan hasil dari kinerja dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan alat akuntabilitas secara periodik. Laporan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memberitahukan hasil tujuan organisasi. Istilah akuntabilitas telah mengambil peran dominan di sektor publik dan swasta, apalagi ketika dipasangkan dengan transparansi dalam pengungkapan informasi. Akuntabilitas dapat sebagai obat yang manjur untuk hampir semua penyakit yang dihadapi individu, entitas, organisasi atau masyarakat. Mengenai dengan organisasi kerja, kelembagaan, seruan untuk akuntabilitas sosial dan lingkungan biasanya untuk memperkenalkan perubahan pada segi akuntansi dan pelaporan yang sedang terjadi. Akuntabilitas sebagai pembenaran utama mewajibkan organisasi sosial besar untuk mengungkapkan informasi dalam pelaporan tahunan mereka Dillard dan Vinnari (2019). Apabila organisasi telah dengan jelas menerangkan hasil dari kinerjanya, maka sudah dapat dikatakan organisasi yang akuntabel.

Budyanto (2022) menjelaskan melalui artikel infopublik 14 April 2022 bahwa kebutuhan teknologi informasi pada era digitalisasi saat ini sangat dibutuhkan, baik dalam penggunaan sehari-hari maupun dalam pelayanan publik pemerintah. Pada

masa yang semakin berkembang ini teknologi informasi secara umum sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan menjadikan masyarakat haus akan informasi-informasi. Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi faktor mobilitas informasi dan sebagai sarana pelayanan masyarakat. Di Kabupaten Temanggung, pemanfaatan teknologi informasi sudah cukup baik. Teknologi informasi yang ada di Kabupaten Temanggung terus berkembang terutama untuk pelayanan publik. Hal tersebut, dibuktikan dengan adanya sarana yang memadahi. Selain itu, aplikasi-aplikasi yang menunjang pelayanan publik juga sudah berkembang, mulai dari aplikasi yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk setiap wilayah sampai aplikasi yang dibuat oleh Kabupaten Temanggung sendiri. Aplikasi LAPOR merupakan salah satu aplikasi yang sudah cukup populer dan memiliki manfaat yang banyak dalam meningkatkan kinerja pemerintah. Dilansir dari kemenkumham.go.id (2018) bahwa di Indonesia LAPOR adalah aplikasi media sosial pertama di Indonesia yang melibatkan hubungan dua arah antara pemerintah dengan masyarakat. Aplikasi LAPOR ini dibuat dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah dalam rangka pengawasan pembangunan dan pelayanan publik.

Selain aplikasi LAPOR, ada aplikasi lain yang juga diharapkan dapat menunjang meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu aplikasi E-TOA. Aplikasi yang memiliki kepanjangan Temanggung on Agenda ini adalah aplikasi yang dapat digunakan pemerintah maupun masyarakat untuk menginformasikan atau mempromosikan acara yang akan dilaksanakan sehingga dapat diketahui dengan mudah

oleh masyarakat luas. Bagi pemegang kepentingan, aplikasi ini sangat bermanfaat karena dapat mengkoordinasi kegiatan. Lebih lanjut lagi Kabupaten Temanggung juga meluncurkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (SiMONEV-KIP) yang digunakan agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi kelengkapan dokumen PPID dari masing-masing badan publik dapat mudah, selain itu bisa dilakukan dengan cepat, murah dan sederhana, infopublik.id (2021)

Berbagai aplikasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung tersebut menjadi bukti bahwa pemanfaatan teknologi informasi di Temanggung sudah cukup baik dan patut untuk terus dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah berkontribusi pada penyebaran kebijakan serta praktik transparansi, dan akuntabilitas pemerintah yang didefinisikan sebagai publisitas dari semua tindakan pemerintah dan perwakilannya untuk menyediakan informasi yang relevan kepada masyarakat sipil dalam tepat waktu (da Cruz dkk., 2016). Oleh karena itu, apabila pemanfaatan teknologi semakin meningkat maka akan memperkuat hubungan transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah.

Penelitian sebelumnya yang membahas pemanfaatan teknologi informasi sebagai pemoderasi sudah dilakukan oleh Arifin, dkk (2020) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dengan sistem informasi akuntansi telah mampu memperkuat pengaruh positif akuntabilitas dan trnsparansi terhadap kinerja pemerintah. Selain itu, penelitian Banusu dan Subarjo (2017) menganalisis pengaruh

pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pemerintah menunjukkan hasil yang signifikan, begitu pula pada penelitian Erawati dan Winangsit (2019) dan Amran (2020). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi mampu memperkuat hubungan akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Jatmiko (2020) yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.” Penelitian ini juga meneliti Akuntabilitas dan transparansi tetapi menambah kontribusi berupa variabel pemanfaatan teknologi sebagai pemoderasi yang sekaligus sebagai pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Alasan menambah variabel moderasi pemanfaatan teknologi informasi dikarenakan kebutuhan teknologi informasi pada era digitalisasi saat ini sangat dibutuhkan, baik dalam penggunaan sehari-hari maupun dalam pelayanan publik pemerintah sekaligus untuk mengetahui apakah teknologi informasi dapat memperkuat hubungan akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, judul dari penelitian ini yaitu Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Pemoderasi.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu,

1. Apakah ada pengaruh positif antara transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Apakah ada pengaruh positif antara akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh positif transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah.
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh positif akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bukti empiris pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintahan daerah.
2. Mengetahui bukti empiris pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintahan daerah.
3. Mengetahui bukti empiris pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh positif transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah.
4. Mengetahui bukti empiris pemanfaatan teknologi informasi memperkuat pengaruh positif akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Secara teori dengan adanya pengungkapan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik lagi.
2. Secara praktis bagi pemerintah dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah sehingga dapat memaksimalkan kualitas kinerja pemerintah. Sedangkan bagi masyarakat, diharapkan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah dapat tersampaikan sehingga masyarakat dapat ikut dalam melihat bagaimana kinerja pemerintah.